



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TURMAN HARDIANTO MAHA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 150108

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.415.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/230 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **181.700.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000
3. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.400.000
4. MOBIL, IGNIS SUZUKI Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	85.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	78.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	670.105.300
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.430.705.300
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.430.705.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.